



Daftar Isi

Pengantar dari Ketua Dewan Pegurus

Akuntabilitas OMS	2
-------------------	---

Pengantar dari Direktur Eksekutif

Membangun Kekuatan Untuk Mewujudkan Demokrasi	4
---	---

Yappika dan aktifitasnya

Sosialisasi Program TPLD di 15 Kabupaten Wilayah Kerja Yappika	7
Mengubah Kata "Dapat" menjadi "Berhak" Perkembangan Advokasi Koalisi	
Kebijakan Partisipasi	8
Membangun Platform Bersama: Sebuah Usaha Melengkapi Alat Gerakan Ornop	10
Mencari Jawaban - Betulkan Kalangan (Ekonomi) Menengah Indonesia	
Enggan Terlibat Dalam Gerakan Pro-demokrasi	11
Rakkfest 2003, Kita Lahir Berbeda Namun Bisa Saling Bicara	12
Relawan, Bentuk Nyata Partisipasi Masyarakat Sipil	13
Hari Anti Penyiksaan	14
Peluncuran Buku "Usaha untuk Mengenang Kisah-kisah Anak-anak Korban 65"	14
Desakan Ratifikasi Kovenan EKOSOB Dalam Peringatan Hak Asasi Manusia	15
Warna-warni Gerakan Masyarakat Sipil di Agenda 2004	15
Memotret "Keberhasilan" Pemberdayaan Rakyat Melalui Film Dokumenter	16
Marajut Hubungan Internasional Kerjasama Dengan CIVICUS untuk Implementasi Indeks	
Masyarakat Sipil (IMS) di Indonesia	17
Lokakarya Pemantau Yayasan Militer	18
Monitoring Bantuan Kemanusiaan di Aceh	19
Dukungan Kepada Korban Tragedi Bulukumba	20
Mengikis Kebingungan Rakyat Terhadap Pemilu 2004	21
Menyusun Kesepahaman untuk Sebuah pemilu yang Damai dan Berkualitas	22
Pemilu 2004 di Bawah Darurat Militer Nanggroe Aceh Darussalam	23

Keuangan

Program-program yang didukung melalui PPD Tahap II	24
Laporan Keuangan	25



Rustam Ibrahim
Ketua Dewan Pengurus Yappika

Akuntabilitas OMS

Adalah merupakan kenyataan yang menggembirakan bahwa proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sampai sekarang telah membawa pertumbuhan yang luar biasa bagi organisasi masyarakat sipil (OMS). Ratusan bahkan ribuan OMS baru telah muncul di seantero Indonesia, bagaikan ribuan bunga berkembang. Sehingga ada yang mengatakan bahwa perkembangan ini sebagai “era kebangkitan masyarakat sipil”.

Masyarakat sipil memang sering dilihat sebagai komponen yang semakin penting perannya dalam proses demokratisasi seperti: membatasi kecenderungan pemerintah untuk otoriter dan menahan laju ekspansi kekuatan pasar yang berdampak negatif, meningkatkan pemberdayaan rakyat, menuntut akuntabilitas politik dan memperjuangkan tata-pemerintahan yang baik (*good governance*).

OMS di Indonesia pun sedikit-banyak telah memberikan andilnya kepada gerakan reformasi, demokrasi dan tata-pemerintahan yang baik. Sebagai contoh adalah semakin meningkatnya fungsi advokasi dan fungsi pemantauan/pengawasan (*watchdog*) dari OMS bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan serta demokratisasi dalam pembuatan kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, semakin meningkatnya peran OMS dalam proses *governance reform*, perlu diimbangi oleh akuntabilitas dan transparansi LSM itu sendiri. Ini akan dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitas OMS yang mulai sering dipertanyakan. Siapa yang diwakili oleh OMS dan siapa yang memberi mandat untuk itu? Bagaimana OMS akan memberikan tanggapan kalau ada kritik-kritik terhadap perilaku OMS yang tidak baik, dan sebagainya?

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai proses dimana OMS mempertanggungjawabkan secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Proses ini diwujudkan dalam mekanisme: pelaporan kepada publik, keterlibatan masyarakat, dan peka serta cepat tanggap terhadap kritik-kritik masyarakat. Sedangkan di tingkat internal OMS juga perlu meningkatkan tata-kelola (*governance*) dari organisasinya.

Sekurang-kurangnya masih ada enam masalah yang dihadapi LSM Indonesia sehubungan dengan akuntabilitas tersebut.

1. Masih banyak LSM yang belum mempunyai visi, misi serta program yang dirumuskan melalui *strategic planning* yang dilakukan secara periodik dan partisipatif. Yaitu, tidak hanya melibatkan eksekutif tetapi juga pengurus, seluruh staf dan wakil-wakil dari masyarakat yang menjadi kelompok dampingan dari LSM bersangkutan.
2. Sedikit sekali LSM yang telah membuat laporan tahunan (*annual report*) untuk publik yang berisikan informasi mengenai program serta kegiatan yang dilakukan LSM dalam tahun bersangkutan, maupun informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh.
3. Masih banyak LSM yang belum memisahkan fungsi antara pengurus (*board*) dengan pelaksana (*executive*) dan mengefektifkan peran pengurus.

4. Masih banyak LSM yang belum mempunyai sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku umum.
5. Masih banyak LSM yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah mencapai hasil dan tujuan yang ditetapkan.
6. Masih banyak LSM yang belum mempunyai prosedur-prosedur standar operasional yang dapat dipakai sebagai pedoman tertulis bagi jalannya organisasi dan program LSM bersangkutan.

Mulai pertengahan tahun 2003 YAPPIKA kembali memberikan bantuan kepada sejumlah LSM di 15 kabupaten di 6 provinsi yang menjadi wilayah kerja YAPPIKA dalam suatu program yang difokuskan kepada pengembangan tata-pemerintahan di daerah yang demokratis (*democratic local governance*). Sebagai suatu program yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar pemerintah daerah menjadi lebih demokratis, transparan dan akuntabel, YAPPIKA juga memfasilitasi upaya peningkatan akuntabilitas LSM-LSM yang menjadi mitranya. Karena itu, di samping memberikan bantuan dana, YAPPIKA juga akan memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas LSM dalam beberapa hal sebagaimana dikemukakan di atas.

Aspek-aspek yang berhubungan dengan *internal governance* yang baik menjadi pertimbangan pula bagi YAPPIKA dalam memutuskan apakah suatu LSM dapat memperoleh dukungan. Sebagai contoh, meskipun isi proposal yang diajukan LSM itu baik, namun YAPPIKA tidak dapat mempertimbangkan dukungan atasnya apabila dalam organisasi tersebut terdapat:

1. Eksekutif organisasi yang menjadi pengurus partai politik. Karena LSM seharusnya merupakan organisasi yang non-partisan.
2. Jabatan pengurus yang dirangkap dengan jabatan eksekutif. Ini dimaksudkan untuk menghindari *conflict of interest* sekaligus menciptakan *checks and balances* yang baik dalam organisasi.
3. Organisasi LSM tersebut merupakan organisasi keluarga di mana suami dan isteri/anak berada dalam organisasi LSM dan menduduki jabatan-jabatan yang penting.

YAPPIKA percaya bahwa usaha-usaha LSM dan OMS Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitasnya, dalam jangka panjang, akan berkontribusi pula terhadap penguatan masyarakat sipil dan proses demokratisasi di dalam masyarakat. Semoga!

Yappika secara terus menerus sangat mengesankan saya

Tahun demi tahun, Yappika secara terus menerus sangat mengesankan saya. Bermula dari proyek capacity-building, Yappika telah tumbuh menjadi organisasi pro-demokrasi terkemuka dalam kancah masyarakat sipil, yang dikenal karena keandalan, kreativitas dan inovasinya. Program-program Yappika seperti advokasi legislatif dan pemantauan pemilu merupakan sumbangsih yang penting bagi proses partisipasi warga dalam transisi Indonesia yang demokratis. Salah satu faktor kunci kesuksesan Yappika adalah manajemen yang mantap dan profesional. Lembaga-lembaga donor maupun mitra-mitra ornop Yappika sangat sadar betapa ketatnya proses monitoring dan accounting di Yappika. Saya ucapkan selamat atas kesuksesan Yappika dalam setahun ini. Besar harapan saya untuk dapat menyaksikan kesuksesan Anda di masa mendatang.

Jerome Cheung
CSO Program Manager - National Democratic Institute



Pengantar dari Direktur Eksekutif

Membangun Kekuatan Untuk Mewujudkan Demokrasi

Lili Hasanuddin

Direktur Eksekutif Yappika

Mewujudkan negeri yang demokratis tidaklah cukup hanya bergantung pada kemurahan hati para elit-elit politik semata. Seluruh sumberdaya dan kekuatan masyarakat sipil haruslah dikonsolidasikan untuk bersama-sama melakukan dorongan ke arah yang demokratis tersebut. Kendati demikian, upaya itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tantangan dan kendala, pasti membayangi bahkan menghadang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh komponen masyarakat sipil, apalagi jika merujuk pada realitas yang terpampang selama ini.

Kebijakan-kebijakan publik masih saja didominasi oleh sudut pandang kalangan birokrasi sesuai dengan kepentingan yang mereka miliki. Tak tersedia cukup ruang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sipil, meskipun mereka adalah pihak yang terkena imbas atas kebijakan publik tersebut. Kalaupun ada, lebih berupa seremoni dengar pendapat atas rancangan kebijakan yang sedang dibahas. Hasil akhirnya tetap saja suara masyarakat sipil terabaikan dalam kebijakan yang diputuskan. Dialog yang sehat antara masyarakat sipil dengan para pembuat kebijakan belum terbangun secara hakiki dan realitas ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga berlangsung pada berbagai daerah.

Proses penyusunan kebijakan publik seperti itu tentu saja tidak senafas dengan semangat demokrasi. Alih-alih membuka ruang perdebatan yang seimbang, proses tersebut justru menutup kesempatan bagi kalangan masyarakat sipil dalam menyampaikan gagasan kreatifnya. Bahkan Pemilu secara langsung pun samar-samar masih menjadi penjara bagi masuknya gagasan perubahan yang bermakna.

Ironisnya, di kalangan masyarakat sipil sendiri masih belum terbangun konsolidasi yang kokoh untuk secara bersama-sama menyikapi situasi yang berkembang. Dalam kalangan Ornop yang selalu mengklaim diri sebagai ujung tombak gerakan demokrasi, misalnya, masih terlihat adanya faksi dan friksi internal. Situasi ini tidak hanya menyebabkan gerakan menjadi jalan di tempat, tetapi bahkan menyebabkan kebingungan yang meluas, mau kemana gerakan diarahkan? Sementara di kalangan masyarakat masih terlihat kegamangan untuk bertindak. Pada era, yang katanya otonomi daerah ini, rakyat masih bingung mencari saluran pelepasan aspirasinya. Padahal tragedi demi tragedi terus muncul di tengah mereka. Tragedi itu tidak hanya berakibat pada kerusakan fisik sumberdaya kehidupan mereka, tetapi juga menelusup hingga pada hancurnya tatanan sosial dan daya kritis masyarakat dalam memandang persoalan. Sekat-sekat pemisah yang membagi masyarakat atas sebuah identitas tertentu, baik atas dasar religi, kultural maupun asal kedaerahan terus dihembus-hembuskan untuk memicu lahirnya konflik kekerasan di tengah masyarakat itu sendiri.

Upaya-upaya untuk melakukan perombakan atas fenomena-fenomena itulah dilakukan Yappika sepanjang guliran waktu tahun 2003-2004. Dari aspek pembuatan kebijakan, kami coba menelisik bagaimana proses pembuatan kebijakan berlangsung selama ini, dan mencoba mencari peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sipil untuk dapat mendesakkan pikiran-pikirannya. Sebuah studi kami lakukan secara serentak di 15 kabupaten pada enam propinsi. Studi ini kami harapkan dapat menjadi bekal bagi kalangan masyarakat sipil untuk memetakan bagaimana sesungguhnya proses penyusunan kebijakan itu berlangsung dan siapa saja pihak-pihak yang mendominasi proses tersebut. Dari pengetahuan tersebut, kami berharap dapat menyusun langkah-langkah yang lebih sistematis dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.

Untuk kalangan publik luas, kami berusaha menularkan keyakinan kami bahwa demokrasi tak akan lahir dari sikap dan perilaku yang menafikan keragaman, baik pendapat, sikap, dan juga tindakan-tindakan yang ada. Pemahaman yang utuh atas adanya perbedaan dan kemudian memunculkan penghargaan yang tinggi atas perbedaan tersebut kami kampanyekan melalui sebuah festival keberagaman dengan tema "Kita Lahir Berbeda Namun Bisa Saling Bicara". Festival tahunan ini memang kami rancang sebagai strategi untuk membangun budaya demokratis dalam entitas ke-Indonesia-an kita, sambil sekaligus mengikis upaya-upaya penyeragaman pandangan dan pikiran. Selain itu, kami juga aktif dalam berbagai kampanye publik lainnya bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat sipil yang peduli dengan masalah anti penyalahgunaan, ratifikasi kovenan Ekosob dan berbagai isu lainnya.

Untuk kalangan masyarakat pada komunitas-komunitas tertentu, kami berupaya mendorong mereka untuk tidak segan-segan berpikir kritis dan membuka ruang perdebatan yang setara atas berbagai gagasan dan pandangan, termasuk ketika mereka berhadapan dengan aparat birokrasi di daerahnya. Upaya-upaya ini kami lakukan bekerjasama dengan beberapa LSM lokal yang bekerja di 15 kabupaten pada propinsi Jatim, NTT, Sulsel, Sulteng, Maluku dan Papua. Kami pun melakukan penyebaran informasi mengenai Pemilu 2004 di beberapa daerah yang akses informasinya sulit, seperti di Toli-toli (Sulteng), Tual (Maluku Tenggara), Sorong (Papua), Maumere (NTT) serta Jember (Jatim). Kegiatan ini kami lakukan, agar hak-hak politik rakyat di daerah setempat tidak hilang percuma hanya karena informasi-informasi yang tepat mengenai Pemilu tidak menjangkau mereka.

Untuk kalangan Ornop, kami mengundang mereka untuk bersama-sama memikirkan bagaimana menggulirkan inisiatif lahirnya sebuah kerangka kerja bersama yang dapat menjadi visi dan misi bagi gerakan sosial ke depan. Tak lupa pula kami coba melihat peluang-



peluang yang mungkin dimanfaatkan untuk memperluas gerakan sosial dengan menjangkau kalangan menengah kota lewat sebuah survey KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*).

Sebuah program bertajuk Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)- yang merupakan kelanjutan kerjasama kami dengan USC Canada atas dukungan CIDA (*Canadian International Agency*)- kami jadikan kendaraan untuk menggulirkan berbagai kegiatan di atas.

Menjelang Pemilu 2004, kami pun menjalin kerjasama dengan USAID (*United States Agency for International Development*) untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu. Kerjasama dengan USAID ini kami laksanakan secara khusus di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sedang berada dalam status darurat militer. Kami meyakini bahwa dalam situasi darurat militer sekali pun, hak-hak politik rakyat untuk menentukan pilihannya harus mendapatkan jaminan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2003-2004 ini Yappika masih tetap menjadi sekretariat dari koalisi Ornop untuk kebijakan yang partisipatif. Koalisi yang mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga dana ini seperti Ford Foundation, Yayasan TIFA dan Ausaid- terus gencar melakukan advokasi lahirnya undang-undang yang memberikan hak bagi rakyat agar dapat terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan.

Tema sentral yang menjadi benang merah dari semua kegiatan yang kami lakukan di atas adalah bagaimana membangun kekuatan masyarakat sipil sebagai salah satu aktor yang mendorong terwujudnya demokrasi di Indonesia. Kami memang baru sampai pada langkah awal yang akan menjadi pondasi penting untuk langkah-langkah selanjutnya. Upaya ini tentu saja masih membutuhkan dukungan yang luas dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama dengan kami. Atas dasar itulah kami mengundang berbagai pihak untuk bisa saling bahu membahu dengan kami mewujudkan harapan-harapan yang serupa.

Organisasi ini lahir dengan keyakinan khusus

Saya ikut terlibat pada program kerjasama yang menjadi asal mula berdirinya Yappika sejak awal tahun 1990. Organisasi ini lahir dengan keyakinan khusus, bahwa Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan perlu diwujudkan, dan bahwa kerjasama internasional cukup penting guna mendorong percepatan gerakan kearah itu. Para penggiat Yappika kala itupun percaya bahwa organisasi yang berdomisili dan bekerja di Indonesia harus diatur sendiri oleh orang Indonesia secara demokratis, modern dan dinamis, serta tetap menghormati orang yang termarginalkan. Yappika, dengan demikian, memang lahir sarat ide, harapan, dan tantangan. Saya melihat Yappika saat ini telah merintis banyak hal sejalan dengan ide tersebut. Jaman telah berganti maka cara yang ditempuh makin bervariasi. Bahkan, syukur kepada Allah, Yappika ikut berpartisipasi dalam barisan yang mengobarkan perubahan jaman, mendorong kejatuhan rezim Orde Baru. Pada awal pendiriannya, Yappika amat tergantung pada satu sumber kerjasama keuangan dengan masyarakat Internasional. Kondisi semacam itu bukan jelek, tetapi bisa mengurangi kemerdekaan dan martabat organisasi. Maka saya bergembira telah tumbuh usaha mandiri untuk mengembangkan kapasitas keuangan organisasi, agar pembiayaan program tidak seluruhnya bersandar pada masyarakat internasional. Semua program Yappika juga tetap mencerminkan roh awal organisasi. Saya bangga melihat perkembangan Yappika. Tulisan ini saya angkat agar makin banyak orang menjadi saksi dan membantu Yappika dalam menjalankan tali mandatnya. Semoga.

Selamat Bekerja bagi semua teman di Yappika.

Meth.Kusumahadi,
USC-SATUNAMA Yogyakarta

Sosialisasi Program TPLD di 15 Kabupaten Wilayah Kerja Yappika



Setelah berhasil menyelesaikan sebuah program yang cukup besar “Partnership Program for Develoment (PPD)” fase pertama, mulai tahun 2003 Yappika melanjutkan program tersebut ke fase kedua. Program baru ini secara spesifik menekankan pada peningkatan kapasitas ORNOP dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan, sekaligus melakukan advokasi/dialog kebijakan untuk mendorong

kelahiran tata pemerintahan yang lebih baik dan

demokratis (good and democratic governance). Tak kalah pentingnya adalah usaha untuk mengembangkan wacana publik dan menggali dukungan publik untuk perubahan kebijakan dan peraturan-peraturan lokal yang diperlukan. Program baru Yappika ini diberi nama program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD). Tema sentral yang diangkat adalah PARTISIPASI sehingga idealnya seluruh proses kegiatan yang dilakukan benar-benar menggambarkan pelibatan seluruh komponen yang ada.

Untuk menyebarluaskan informasi tentang program TPLD ini, Yappika mensosialisasikan dengan beberapa cara salah satunya dengan datang langsung ke lokasi 15 wilayah kerja yakni :

- Provinsi Jawa Timur (Kab Jember, Kab Bojonegoro, Kota Malang),
- Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab Lembata, Kab Sikka dan Kab Kupang),
- Provinsi Sulawesi Selatan (Kab Luwu, Kab Bulukumba dan Kota Makassar),
- Provinsi Sulawesi Tengah (Kab Toli-toli, Kab Donggala dan Kota Palu),
- Papua (Kota Jayapura dan Kab Sorong) dan
- Kabupaten Maluku Tenggara.

Selain pendekatan di atas, pendekatan lain juga dilakukan seperti: melalui mailing list, pengiriman email ke rekan/lembaga mitra yang dikenal, posting di website Yappika, dan melalui temu muka dengan aktivis ORNOP dari wilayah kerja yang datang ke Yappika. Yappika terbuka bermitra dengan ORNOP mana saja, asal memenuhi kriteria dasar non-partisan, memiliki pengelolaan internal (internal governance) yang transparan dan akuntabel, serta memiliki strategi yang cukup jelas untuk mendorong, mempraktekkan dan mempromosikan keadilan gender dan keberlanjutan lingkungan. Hal lain yang tak kalah penting adalah keselarasan dan sinergi visi-misi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Mengubah Kata “Dapat” menjadi “Berhak”

Perkembangan Advokasi

Koalisi Kebijakan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena secara langsung maupun tidak langsung, implementasi sebuah UU akan berdampak kepada mereka. Menanggapi hal ini, Koalisi Kebijakan Partisipatif (dahulu disebut juga TCP3) melakukan advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna menjamin partisipasi masyarakat dalam proses legislasi (pembuatan perundang-undangan). Ada empat alasan yang menjadi dasar kegiatan ini, pertama, alasan praktis yaitu apapun produk kebijakan akan berdampak langsung kepada masyarakat. Kedua, alasan demokratis yaitu masyarakat berhak terlibat dalam seluruh proses legislasi. Ketiga, alasan hukum yaitu bila suatu perundang-undangan diundangkan maka masyarakat harus mengetahuinya. Keempat, alasan pendidikan yaitu peluang masyarakat dalam menerima pendidikan politik semakin besar dengan terbukanya ruang partisipasi dalam proses legislasi.

Pada awalnya Koalisi berusaha mengusulkan agar ruang partisipasi masyarakat dijamin dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, meskipun konsekuensi dari usulan tersebut akan mengubah pasal-pasal lain yang terdapat dalam RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Salah satu pasal RUU PPP yang menjadi sasaran advokasi Koalisi adalah pasal 58 yang berbunyi “Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan maupun pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.” Koalisi menilai pasal ini tergolong pasal karet (lentur) karena tidak ada aturan pada ruang mana saja partisipasi masyarakat itu boleh dilakukan.

Saat ini Panitia Kerja (Panja) sudah menerima salah satu usulan Koalisi terhadap RUU PPP yaitu mengubah pasal partisipasi masyarakat (pasal 58) yang berbunyi “.....masyarakat dapat memberikan masukan.....” menjadi “.....masyarakat berhak memberikan masukan.....” beserta penjelasan bahwa mekanisme hak tersebut disesuaikan lebih lanjut di dalam tata tertib DPR/D. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah disahkan pada tanggal 24 Mei 2004.

Diterimanya usulan tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan kerja Koalisi walaupun masih dalam skala kecil. Namun dengan adanya perubahan pada pasal 58 tersebut maka terbuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sebanyak lima fraksi di DPR yaitu Golkar, PDIP, Reformasi, PPP, dan PKB mendukung usulan Koalisi.

Sementara fraksi TNI dan pemerintah tidak memberikan respon atas usulan Koalisi.

Upaya lain yang dilakukan Koalisi untuk memperoleh dukungan dari banyak pihak adalah melibatkan media dalam bentuk *briefing* media dan konperensi pers serta melibatkan kelompok



akademisi dengan melakukan diskusi pakar. Di tingkat daerah, Koalisi melakukan upaya penguatan terhadap advokasi prinsip dan mekanisme partisipasi dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan melakukan aktivitas yang mendukung advokasi RUU PPP seperti workshop dan seminar tentang pembuatan peraturan yang partisipatif. Harapannya adalah keberhasilan di tingkat nasional ini dapat



dilanjutkan di daerah untuk secara serentak mendorong terciptanya pembuatan Perda yang melibatkan masyarakat.

Untuk keperluan advokasi RUU ini, Koalisi Kebijakan Partisipatif memperoleh dukungan dana dari *The Ford Foundation*, AusAID dan Yayasan TIFA. Dana ini dipergunakan untuk biaya kesekretariatan, melakukan diskusi simpul dan seminar di 13 daerah, diskusi pakar hukum sebanyak 2 kali, pertemuan-pertemuan anggota, pembuatan leaflet, talkshow di radio Namlapanha dan sebagainya. Yappika yang bertindak sebagai sekretariat Koalisi Kebijakan Partisipatif juga memberikan dukungan untuk aktivitas pembuatan draft persandingan, dan pembuatan narasi perjalanan Koalisi.

Yappika mempunyai ciri khas sebagai LSM yang punya nama

Pertama kali berkenalan dengan Yappika, saya masih merupakan aktivis partai politik, yakni fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Kala itu, Agustus 2000, Yappika bersama sejumlah aktifis lembaga swadaya masyarakat dan fungsionaris partai politik sedang menyusun Skenario Masyarakat Sipil Indonesia 2010. Saya terlibat di dalam proses itu, lalu ikut menyusun hasil akhirnya menjadi sebuah buku. Dari sanalah saya berkenalan dengan berbagai kalangan LSM di Jakarta, khususnya, dan yang berdatangan dari daerah-daerah lain, umumnya. Saya mulai paham, lalu tertarik, dengan aktifitas LSM. Bagi saya, kegairahan dunia LSM lebih memberikan warna tersendiri, ketimbang hanya sebagai politikus yang berkiprah di ranah kekuasaan.

Setelah mundur dari DPP PAN pada bulan Januari 2001, lalu bekerja di Center for Strategic and International Studies (CSIS), saya semakin sering berhubungan dengan Yappika, mulai dari diskusi, aksi, sampai penelitian dan konferensi pers. Bagi saya, Yappika mempunyai ciri khas sebagai LSM yang punya nama, tetapi tetap dengan sikap yang merunduk. Inter-relasinya dengan LSM dan teman-teman di daerah membangun pola hubungan tersendiri, sehingga berhasil menjadi organisasi berbasis jaringan. Perhatian Yappika yang khusus terhadap konflik, juga daerah-daerah konflik, membantu saya sebagai analis, peneliti, juga penulis di berbagai media massa Jakarta. Sebab, data-data yang dihadirkan lebih memudahkan saya memotret berbagai hal yang mungkin penting diketahui oleh publik yang lebih luas. Apalagi, Yappika akrab dengan penerbitan buku-buku berdasarkan apa yang diprogramkan.

Harapan saya, Yappika terus mengembangkan diri dengan ciri atau karakter yang dimiliki selama ini, sembari terus berupaya menghapuskan segala bentuk eksploitasi manusia dan alam oleh manusia-manusia Indonesia yang tak bertanggung-jawab.

Indra J. Piliang
Peneliti CSIS

Membangun Platform Bersama: Sebuah Usaha Melengkapi Alat Gerakan ORNOP

Konsolidasi adalah sebuah kata kerja yang harus dilakukan oleh gerakan ORNOP untuk membangun gerakan bersama. Beberapa masalah terkait dengan konsolidasi ini telah disadari oleh kalangan ORNOP. Dari hasil refleksi yang telah dilakukan oleh beberapa ORNOP, berhasil diidentifikasi permasalahan-permasalahan dasar dari gerakan ORNOP yang mencakup:

- Ornop selama ini bekerja sendiri-sendiri, sehingga rawan faksi dan fiksi.
- Belum adanya platform bersama, yang ada hanya platform lembaga
- Belum berhasil membangun kesadaran politik rakyat
- Kurang memahami realitas rakyat (bersifat elitis) dan tidak memiliki basis

Disisi lain, ORNOP juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Harus diakui bahwa krisis yang melanda bangsa hingga saat ini, pertama-tama dan terutama disebabkan karena negara telah mengabaikan dan meninggalkan dua hal yang sangat penting, yaitu Demokratisasi dan Keadilan Sosial. Struktur ekonomi dan politik di negeri ini tidak dijalankan atas kepentingan rakyat, namun didominasi oleh segelintir elit yang bergandeng tangan erat dengan pemilik modal.

Secara jujur diakui bahwa ORNOP belum berhasil mempengaruhi penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut secara signifikan. Kalaupun ada, sifatnya sangat terbatas dalam ukuran komunitas atau lokalitas tertentu saja. Telah berulang kali refleksi, reposisi, reorientasi, restrukturisasi gerakan dilakukan oleh kalangan ORNOP, namun semua itu belum memperlihatkan hasil yang cukup berarti. Disisi lain, penyimpangan dalam pelaksanaan roda pemerintahan negara cenderung meningkat grafiknya, bahkan dilakukan secara terbuka.

Berangkat dari kondisi tersebut, terutama melihat kelemahan yang ada di dalam gerakan ORNOP, disepakati adanya gagasan untuk menyusun sebuah bingkai bersama (common platform) berbasiskan pada pengalaman-pengalaman kerja yang pernah dilakukan kalangan ORNOP serta perkembangan-perkembangan situasi

negara. Bingkai kerja bersama ini telah berhasil disusun oleh sebuah tim think thank yang terdiri dari: Lili Hasanuddin (Yappika), Ruth Indiah Rahayu (Kalyanamitra), Munarman (YLBHI), Ridha Saleh (WALHI) dan Chalid Muhammad (JATAM) dengan judul "Masyarakat Indonesia, Demokrasi Sosial Indonesia". Saat ini, platform telah digulirkan di berbagai kalangan, dalam rangka mendapat masukan guna penyempurnaan.



Mencari Jawaban

Betulkah Kalangan (Ekonomi) Menengah Indonesia Enggan Terlibat Dalam Gerakan Pro-demokrasi?

Apakah betul kalangan (ekonomi) menengah Indonesia enggan terlibat dalam gerakan pro-demokrasi (bila dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari Philippina misalnya)? Kalau ya, apa yang menjadi penyebab keengganan itu? Apakah karena malas, kurang pengetahuan, kurang dorongan, atau? Maukah mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan pro-demokrasi, bila ada wadah untuk itu?

Merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dari pelaksanaan survey KAP (*Knowledge, Attitude & Practice*) yang dilakukan Yappika di Bulan September sampai dengan Desember 2003. Dengan dibantu oleh Indopacific - survey KAP ini menjangkit 308 responden, 53% adalah pria dan 47% wanita, dari kelas menengah (memiliki jabatan setingkat penyelia hingga manajer, memiliki pengeluaran pribadi/keluarga minimal Rp. 2 juta perbulan, memiliki alamat e-mail) di wilayah Jabotabek.

Dari hasil survey diketahui bahwa tingkat pengetahuan kelas menengah Indonesia tentang demokrasi dan proses-proses yang mendukung demokrasi cukup memadai, bahkan 92% berpendapat bahwa partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan itu penting, meski mereka jarang terlibat didalamnya. Bentuk partisipasi paling banyak dipilih responden adalah: menggunakan hak suara melalui pemilu, menjadi peserta aktif dalam talkshow, menulis surat pembaca, dan ikut demonstrasi (70% diantara responden menggunakan hak suaranya saat Pemilu serta menjadi peserta aktif dalam talk show, khususnya masalah pemberantasan KKN). Responden pun cukup mengenal bentuk-bentuk penyampaian aspirasi lain seperti mengirim surat pembaca 79%, mengikuti hearing di DPR 68%, lobby/audiensi ke pemerintah/DPR 60%, membuat petisi 60% dan menandatangani petisi 57%.

Meskipun sebagian besar responden (80%) mengakui belum pernah berhubungan dengan ORNOP, sebanyak 72% bersedia menjadi tenaga sukarela sesuai keahlian/minat masing-masing; 70% memilih partisipasi pasif dengan mengikuti seminar, diskusi atau acara sejenis yang diadakan ORNOP; 42% bersedia aktif turut dalam pergerakan atau kampanye publik oleh ORNOP; 30% rela menyumbangkan dana; dan 24% berniat menjadi anggota aktif ORNOP. Responden yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri cenderung bersedia terlibat dalam kegiatan ORNOP dan menyalurkan aspirasi mereka lewat jenis organisasi non-profit ini.

Hasil survey KAP diatas memberikan gambaran, bahwa tidak aktifnya kalangan menengah di Indonesia untuk isu-isu seputar demokrasi bukan disebabkan miskinnya pengetahuan. Tidak mustahil bahwa kalangan ekonomi menengah di Jabotabek akan bergerak, bila kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dan mampu menciptakan mekanisme penyaluran aspirasi/partisipasi yang sesuai dan mudah diakses mereka.



RakkFest 2003

Kita Lahir Berbeda Namun Bisa Saling Bicara

Dalam rangka menyuarakan kepedulian terhadap kenyataan keberagaman (pluralisme) di negeri ini, pada tahun 2003 Yappika kembali menyelenggarakan Festival Rayakan Keberagaman Kita (RAKK-Fest) untuk kali ke dua. Festival yang berhasil melibatkan 12 lembaga dalam kepanitiaan ini diselenggarakan pada tanggal 12 September - 24 Oktober 2003 dengan mengusung tema "Kita Lahir Berbeda Namun Bisa Saling Bicara".

Sebanyak kurang lebih 7,000 orang dari beragam usia dan latar belakang sosial terlibat dalam penyelenggaraan RAKK-Fest 2003 melalui 12 macam kegiatan yang dilakukan, di antaranya adalah pameran dan bazaar, karnaval, pertunjukan seni, lomba mewarnai, fashion show anak keberagaman, gelar spanduk nurani, diskusi panel dan dialog publik tentang pluralisme, lomba cerpen dan baca puisi se-DKI, lomba teater, dongeng pluralisme dan lomba gambar di 7 lokasi di Jakarta dan Bekasi. Puncak acara dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 27 - 28 September 2003, bertempat di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, diliput Radio 68H sebanyak 3 kali.

Banyak pelajaran berharga diperoleh dari penyelenggaraan RAKK-Fest 2003. Berbagai dukungan diperoleh dari banyak pihak. Sebanyak 60 orang relawan terlibat aktif selama persiapan sampai akhir kegiatan, bahkan mereka bekerja hingga larut malam. Dua stasiun radio, yaitu Sonora dan 68H, menyiarkan ad-lips sebanyak 7 kali per hari selama 6 hari secara gratis. Gelanggang Remaja (GOR) Jakarta Timur dan persewaan tenda Kiky memberikan discount yang cukup besar untuk penyelenggaraan puncak Festival. Lima orang pegawai GOR turut terlibat intensif dalam membantu puncak acara, pihak keamanan dari Polda Metro Jaya dan Polsek setempat memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan yang diurus cukup mendadak serta memberikan pengamanan selama berlangsungnya puncak acara.

Fenomena menarik lainnya dari RAKK-Fest 2003 adalah pelibatan berbagai komunitas secara intensif. Mereka adalah komunitas seniman Rempug Bersama yang bermarkas di Jakarta Timur, komunitas anak jalanan terorganisir dari Bogor yang tergabung dalam Rumah Kita, dan para seniman yang mengisi panggung pertunjukan selama 2 hari di puncak acara secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa penggalangan sumber daya masyarakat, baik dalam bentuk inkind maupun dana sangat mungkin dilakukan. Yang menjadi tantangan adalah cara mengkomunikasikan gagasan, sehingga mereka tertarik dan merasa penting untuk turut bergerak. Kita Lahir Berbeda Namun Bisa Saling Bicara, tema besar yang diusung oleh RAKK-Fest 2003 ini semoga menjadi salah satu titik awal kepedulian semua pihak untuk tetap berdamai dalam keberagaman.



Relawan, Bentuk Nyata Partisipasi Masyarakat Sipil

Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kerja-kerja ORNOP, Yappika mulai mengembangkan system penerimaan dan pengelolaan relawan untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Jakarta. Strategi pengelolaan relawan mencakup, diantaranya, produksi dan penyebaran buku panduan relawan ke berbagai kalangan, penyediaan berbagai aktivitas yang mendorong kesukarelawan, dorongan untuk terlibat sebagai relawan, serta mekanisme evaluasi dan team building. Sebanyak 60 orang relawan telah terlibat dalam kegiatan Festival Rayakan Keberagaman Kita (RakkFest) 2003 dan 24 orang dalam kegiatan pemantauan pemilu 2004. Mereka bekerja secara sukarela dan hingga larut malam. Keterlibatan mereka adalah bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam proses-proses perubahan sosial di negeri ini. Terima kasih para relawan, atas sumbangan tenaga dan pemikiran anda semua!



Hari Anti Penyiksaan

International Day in Support of Victim of Torture yang di Indonesia dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan diperingati setiap tanggal 26 Juni. Hari ini telah dicanangkan melalui resolusi PBB pada tanggal 12 Desember 1997. Dalam beberapa tahun terakhir Yappika bersama beberapa lembaga lain secara rutin telah berupaya untuk memperingati hari ini sebagai salah satu momen yang layak dikenang bahwa penyiksaan harus dihapuskan dari bumi Indonesia khususnya.

Peringatan tahun ini dilakukan secara bersama-sama melalui Jaringan Melawan Penyiksaan, dimana kegiatan dipusatkan di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan tema Memerangi Segala Bentuk Penyiksaan yang menampilkan Barongsai, testimoni korban Semanggi, Testimoni korban Penculikan, korban Indorayon, orasi politik Dita Indah Sari, Emha Ainun Najib dan doa dari 8 pemuka agama (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Brahma Kumaris, Kepercayaan, Baha'i). Selain itu peringatan ini juga menampilkan Teater dari Sanggar Satu Bumi dan Performance art KIPPAS.



Peluncuran Buku

"Usaha untuk Mengenang Kisah-kisah Anak-anak Korban '65"



Tragedi '65 yang lebih dikenal dengan G 30 S/PKI atau disebut juga "Gestapu" maupun "Gestok" oleh berbagai kalangan akan tetap menjadi sejarah hitam bangsa ini. Begitu banyak nyawa yang hilang, dan begitu banyak penderitaan yang ditimbulkan oleh stigma yang muncul akibat sejarah kelam tersebut. Keturunan aktivis (atau disangka aktivis) PKI menjadi bagian dari 'black-list', tanda "ET" di kartu identitas, sehingga sulit memperoleh pekerjaan maupun mendaftar ke

sekolah-sekolah tertentu.

Deklarasi Universal HAM salah satunya memuat "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama,...". Bunyi deklarasi itu seharusnya menjadi panutan, agar tak terjadi diskriminasi bagi anak-anak bangsa ini, apapun ideologi orang tua mereka. Diilhami deklarasi HAM dan kerja-kerja banyak pihak untuk pemulihan nama korban G 30 S PKI, pada tanggal 22 Desember 2003, bertempat di STT Jakarta, Yappika mengadakan peluncuran buku bertajuk "Usaha untuk mengenang kisah-kisah anak-anak korban '65" yang menghadirkan pembicara : Ali Sadikin, MM.Billah, Gus Sallahudin Wahid, Witaryono Reksoprodjo serta Testimoni dari Ibu Svetlana Dayani (Putri Bapak Soenyoto). Peluncuran buku ini diawali Pemutaran Film MassGrave, yakni film ditemukannya kuburan massal peristiwa '65 di Desa Shukup - Wonosobo, yang dilakukan oleh Solidaritas Nusa Bangsa.

Desakan Ratifikasi Kovenan EKOSOB Dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia

Selama ini, peringatan Hari HAM setiap tanggal 10 Desember sering didominasi isu-isu seputar hak-hak sipil-politik. Namun pada peringatan hari HAM 2003, sejumlah ORNOP termasuk Yappika mengangkat isu "hak-hak ekonomi-sosial-budaya", atau yang lebih dikenal dengan "hak ekosob", mencakup: hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Momentum ini digunakan untuk mendorong Pemerintah RI segera meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Desakan kepada pemerintah RI ini tertuang dalam pernyataan sikap "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak EKOSOB" yang dibacakan pada peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember 2003 di Hotel Redtop Jakarta. Selain pembacaan pernyataan sikap Koalisi, juga digelar pemutaran film tentang HAM, pameran

beberapa lembaga, diskusi interaktif yang bertema "Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia" yang mengundang narasumber Dr. Ir. Adhi Santika dari Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya Depkeh-Ham, Patra dari YLBHI dan Korban penggusuran Jembatan Besi Jakarta Utara. Group band Slank yang membawakan lagu H.A.M. Burger turut memeriahkan peringatan



Warna-warni Gerakan Masyarakat Sipil di Agenda '2004

Penghujung tahun 2003 Yappika kembali menerbitkan Buku Agenda harian untuk tahun 2004 yang menampilkan berbagai karakteristik Gerakan Masyarakat Sipil di Indonesia. Buku Agenda yang bertajuk "Warna-Warni Gerakan Masyarakat Sipil" ini ingin mencoba menggambarkan kekayaan gerakan masyarakat sipil di tengah bangsa ini sekaligus pengorbanan yang pernah diberikan oleh para aktor yang terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut. Beragam gerakan kami hadirkan, yaitu gerakan kaum tani, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan, kaum miskin kota, gerakan jurnalis, gerakan perempuan, dan seniman. Harapan kami, semoga taruhan yang sedemikian mahal yang diberikan oleh para aktor gerakan tersebut, sampai menyangkut nyawa manusia itu, bermakna.

Memotret 'Keberhasilan' Pemberdayaan Rakyat Melalui Film Dokumenter



Proses pemberdayaan rakyat membutuhkan ketelatenan, kegigihan, dan pemahaman atas dinamika dan aset rakyat yang ingin didampingi. Namun pengalaman dan pelajaran berharga dari proses yang menguras banyak energi dan sumber daya, seringkali hilang begitu saja karena tidak didokumentasikan dengan baik. Berawal dari kondisi tersebut, Yappika mencoba memotret pengalaman proses-proses pemberdayaan rakyat yang dilakukan oleh dua mitra Yappika dalam sebuah film dokumenter. Dua mitra Yappika tersebut adalah Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba Sulawesi Selatan dan Yayasan Pengembangan Bambu Flores (YPBF) di Maumere NTT. Dalam kiprahnya, mereka menggunakan alat-alat produksi dan informasi yang telah dimiliki dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri untuk berinteraksi, dan mencoba mendorong “perubahan” lewat antisipasi atas kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat. Hasilnya adalah: berdirinya organisasi rakyat yang cukup solid, yang meskipun belum mampu berfungsi maksimal, toh dapat mewakili artikulasi kepentingan komunitas mereka.

Keberadaan film dokumenter ini diharapkan dapat menjadi cermin kerja serius dan dedikasi yang seharusnya ada dan dikembangkan sebagai bagian dari organisasi-organisasi yang ingin berkiprah pada tataran 'pemberdayaan rakyat', sekaligus memotret makna 'berdaya' bagi rakyat yang didampinginya. Selain itu film ini dapat memberi gambaran bahwa sebuah proses pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak tanpa kecuali. Bekerja sama dengan Yayasan Satu Nama Yogyakarta, kegiatan ini terlaksana di Bulan Juni 2003.

Merajut Hubungan Internasional

Kerjasama dengan CIVICUS untuk Implementasi

Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Indonesia

Di bulan Oktober 2003, Yappika dipilih oleh CIVICUS menjadi organisasi nasional (National Coordinating Organization/NCO) untuk mengimplementasikan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Indonesia. Kerja besar melibatkan 64 organisasi dari 64 negara di berbagai belahan dunia (Asia, Amerika, Eropa, Australia) ini dikoordinasikan oleh CIVICUS, sebuah aliansi organisasi masyarakat sipil berskala internasional, yang didirikan di tahun 1993 dalam rangka memperkuat aksi-aksi warga-negara dan masyarakat sipil (MS) di seluruh dunia. Saat ini CIVICUS memiliki 650 anggota dari 110 negara, terdiri dari jaringan MS maupun organisasi-organisasi yang bergerak di berbagai sektor, seperti: perubahan kebijakan dan penelitian, kelompok muda, perempuan dan lingkungan.

Kalau di tahun 2002-2003 Yappika melaksanakan implementasi IMS khusus untuk Indonesia, kali ini kita merupakan bagian dari sebuah kerja internasional. Ada kepentingan perbandingan dengan negara lain, dan oleh karenanya perlu standarisasi alat analisis dan metodologi pelaksanaan. Sama halnya dengan di tahun 2002-2003, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memberi wadah bagi MS untuk berefleksi mengenai kondisi/status mereka, sekaligus merangsang kemunculan strategi-strategi yang lebih bernas, dalam rangka memperkuat posisi MS - memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sekaligus mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Berbagai kegiatan yang dirancang dalam implementasi IMS terdiri dari: penelitian mendalam di tataran komunitas dan organisasi masyarakat sipil tentang keaktifan warga di sektor ini dan dampak MS terhadap kehidupan sosial-ekonomi-politik, penelitian tentang pengaruh organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, penelitian tentang corporate social responsibility, lokakarya tingkat regional dan tingkat nasional dengan peserta organisasi masyarakat sipil dan stakeholder kuncinya, review pemberitaan media masa tentang masyarakat sipil, dan pada akhirnya lokakarya untuk melakukan penilaian atas status/kondisi masyarakat sipil.

CIVICUS merasa bangga dapat bekerja kembali dengan YAPPIKA

Dalam seluruh interaksi saya dengan YAPPIKA, saya telah dihadapkan pada sebuah profesionalisme dan komitmen yang sangat tinggi dalam mendorong masyarakat untuk mengembangkan dan mempraktekkan demokrasi. Kemampuan YAPPIKA dalam merangkul para aktor di tengah kancah masyarakat sipil dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan sektor sosial lainnya sungguh mengesankan. Saya juga selalu menikmati interaksi saya dengan staf YAPPIKA, mereka mampu membuat sebuah pertemuan yang efektif dan menciptakan atmosfer yang positif di antara peserta. CIVICUS merasa bangga dapat bekerja kembali dengan YAPPIKA dalam mengimplementasikan isu masyarakat sipil di Indonesia.

Volkhart Finn Heinrich

Project Manager, CIVICUS Civil Society Index
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
P O BOX 933, SOUTHDALE, 2135 -SOUTH AFRICA

Lokakarya

Pemantau Yayasan Militer

Data tentang yayasan yang dimuat dalam website dbyayasan.org - sebuah website tentang yayasan yang dikelola oleh Yappika yang tergabung dalam koalisi advokasi RUU yayasan - memberi gambaran peran signifikan yayasan-yayasan yang berafiliasi pada kalangan

militer dalam penggalangan dana untuk kebutuhan militer. Banyak perusahaan milik konglomerat yang terlibat dalam yayasan militer selain perusahaan yang dijalankan oleh militer sendiri. Melihat temuan ini, Yappika bersama dengan National Democratic Institute (NDI) mengadakan lokakarya untuk mempertemukan para peneliti, aktivis dan jurnalis muda yang tertarik pada isu ini. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2003 di Jakarta dan diikuti oleh 26 peserta dari 13 daerah, termasuk dari Jakarta. Beberapa kesepakatan yang terjadi dalam lokakarya itu antara lain dibentuknya Jaringan Pemantau Bisnis Militer, dengan rencana kegiatan meliputi: advokasi, komunikasi dan informasi, serta riset dan data. Selain itu juga disusun kode etik dan prinsip-prinsip penelitian untuk anggota jaringan.



YAPPIKA bekerja secara konsisten

Ketika menyebut nama YAPPIKA, biasanya orang akan teringat dengan kerja-kerja besar Koalisi-Koalisi Ornop dan jaringan Ornop di banyak daerah di Indonesia. YAPPIKA mengerjakan sesuatu yang bagi banyak Ornop yang lahir paska-1998 mungkin tidak terlalu dilihat: merangkul Ornop-ornop di banyak tempat untuk sama-sama bekerja secara konkrit dalam berbagai isu, mulai dari pengorganisasian sampai pada advokasi kebijakan yang penting bagi gerakan masyarakat sipil, seperti Koalisi Yayasan dan Koalisi Kebijakan Partisipatif. Dan yang lebih penting lagi, YAPPIKA bekerja secara konsisten.

Bivitri Susanti

Direktur Eksekutif - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Monitoring Bantuan Kemanusiaan di Aceh

Perjanjian Jenewa yang ditandatangani 9 Desember 2002 (Cessation to Hostilities Agreement) antara pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka memberikan peluang untuk penyelesaian konflik di Aceh secara damai. Pasca perjanjian Jenewa, pemerintah Jepang memfasilitasi pertemuan lanjutan di Tokyo untuk mematangkan proses penyelesaian damai, sekaligus membicarakan program-program perbaikan sosial



ekonomi untuk Aceh, menghadirkan pemerintah RI, GAM, lembaga-lembaga donor. Dalam pertemuan ini muncul pernyataan dari para lembaga donor untuk memberikan bantuan dana guna pemulihan kondisi Aceh, baik sosial ekonomi maupun kemanusiaan (rehabilitasi korban konflik). Merespon komitmen para lembaga donor tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK) dengan dukungan YAPPIKA membuat program "Pengawasan Publik Mencegah terjadinya Korupsi Dana Bantuan Kemanusiaan Pasca Pertemuan Jenewa dan Tokyo". Program ini bertujuan memperkuat partisipasi rakyat untuk mengawasi dan memantau dana bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi Aceh; mendorong adanya mekanisme pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi; serta meningkatkan kapasitas SAMAK menjadi organisasi yang kuat dan efektif dalam mengawal pemberantasan korupsi di Aceh. Dalam perjalanannya, dana bantuan yang dijanjikan oleh para lembaga donor tersebut ternyata tidak terealisasi sehingga SAMAK hanya memantau penggunaan dana yang disediakan oleh Pemda di Aceh. Namun hal ini pun tidak berjalan mulus karena penerapan Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam oleh Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 2003.

Saya bangga dengan Yappika

Saya bangga dengan Yappika yang ikut serta memikirkan kepentingan bangsa meskipun bukan anggota DPR. Dan, saya bangga bahwa apa yang dipikirkan, diusulkan oleh Yappika benar-benar bercerminkan kepentingan bangsa dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Bahkan pada masa sekarang ini sulit mencari kelompok yang sanggup bertahan dengan penuh perjuangan seperti yang dilakukan kawan-kawan LSM.

Saya berharap bahwa apa yang dilakukan ini supaya dapat lebih optimal, karena LSM mewakili kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya karena LSM menjadi gambaran representasi adanya dukungan dari masyarakat.

Patrisalis Akbar

Komisi II DPR RI Fraksi Reformasi

Dukungan Kepada Korban Tragedi Bulukumba



Tragedi berdarah yang memakan korban rakyat kembali terjadi di negeri ini. Tanggal 21 Juli 2003, sejumlah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap para petani di desa Bonto Mangiring, Bulukumba Sulawesi Selatan. Para petani ini tengah melakukan aksi damai untuk memperjuangkan hak atas tanah yang tengah menjadi sengketa dengan PT London Sumatra (LONSUM) dan pembebasan beberapa orang warganya yang ditahan polisi dengan tuduhan telah merusak tanaman kacang merah. Sejumlah petani tewas dan luka-luka dalam tragedi tersebut. Ratusan aparat keamanan melakukan penyisiran di sejumlah desa untuk melakukan intimidasi dan penangkapan terhadap warga yang dianggap dalang aksi protes tersebut. Beberapa desa berubah menjadi desa mati karena ditinggalkan oleh warganya lari ke hutan dan daerah aman lainnya, untuk menghindari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Tragedi berdarah tersebut memperoleh simpati dari banyak kalangan. Sejumlah elemen masyarakat serentak bergerak untuk membela para petani, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di Makassar dibentuk Solidaritas Ornop Sulsel (SOS) untuk Bulukumba, di Jakarta dibentuk Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB). Berbagai upaya segera dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut guna memberikan bantuan kemanusiaan, obat-obatan, bantuan hukum, aksi, lobby dan kampanye baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Yappika yang kebetulan mempunyai mitra yang bekerja di wilayah Bulukumba turut aktif memberikan dukungan sebagai wujud simpati dan kepedulian terhadap gerakan rakyat. Dukungan diberikan untuk upaya konsolidasi organisasi rakyat dalam pelaksanaan kongres Dewan Rakyat Bulukumba, upaya bantuan hukum bagi petani yang menjadi tersangka dan saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kasus (TEBAK) Lonsum, serta mengikuti sejumlah pertemuan dan aksi ke Mabes Polri, Komnas HAM maupun DPR RI.

YAPPIKA telah menjadi sebuah organisasi yang kompeten dan dikenal banyak pihak

YAPPIKA telah menjadi sebuah organisasi yang kompeten dan dikenal banyak pihak, dengan terobosan-terobosan baru dan pendekatan program yang dilakukannya serta pelayanan yang diberikan kepada organisasi lain, bukan hanya di Indonesia, namun juga di tingkat internasional.

Margot Stevens
USC Canada

Mengikis Kebingungan Rakyat Terhadap Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu dengan sistem yang benar-benar baru, sangat berbeda dengan sistem Pemilu 1999, dan jelas lebih rumit. Rakyat tidak hanya dihadapkan pada pilihan atas partai politik, tapi juga pilihan individu di partai politik yang akan mewakili suara mereka (DPR/DPRD), dan pilihan individu yang akan mewakili propinsi untuk duduk di kursi DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Disisi lain, Pemilu pun tidak hanya berhenti pada pemilihan DPR, DPRD dan DPD. Ada juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu banyak perubahan sistem, namun begitu terbatas sosialisasi atas perubahan tersebut oleh Pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat yang sama sekali belum mengetahui sistem Pemilu yang digunakan pada pemilu 2004.

Mensikapi kondisi di atas, Yappika berinisiatif melakukan sosialisasi terhadap UU Pemilu no. 12 th 2003 melalui diskusi publik dengan tema "Kondisi Masyarakat Sipil dihadapkan pada Pemilu 2004 dengan Sistem Proporsional terbuka" dan mengadakan diskusi kampung dengan beberapa komunitas. Tujuan kegiatan tersebut adalah memperkenalkan kepada publik UU Pemilu No. 12 thn 2003 termasuk kelebihan dan kelemahannya, mengajak para peserta diskusi untuk membicarakan sejauhmana kesiapan rakyat menyongsong Pemilu 2004 serta bagaimana rakyat menentukan pilihannya dalam pemilu secara rasional. Simulasi cara pencoblosan juga dilakukan dalam kegiatan tersebut guna mengantisipasi hilangnya suara si pemilih akibat kesalahan dalam melakukan pencoblosan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan mulai bulan Agustus 2003 sampai dengan Januari 2004. Sasaran kegiatan adalah wilayah kerja program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD), terutama untuk wilayah-wilayah yang masih sulit mendapatkan akses informasi, seperti: Sorong/Papua, Tual/Maluku Tenggara, Maumere/Flores, Kupang/Timor, Bojonegoro dan Jember/Jawa Timur, Palu dan Toli-Toli/Sulawesi Tengah.



Menyusun Kesepahaman Untuk Sebuah Pemilu Yang Damai dan Berkualitas

Perbedaan pendapat dan kepentingan yang berujung kekerasan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dan Pemilihan Umum (Pemilu), yang memberi ruang bagi banyak kepentingan untuk saling memperebutkan dukungan masa, merupakan satu momen yang sangat potensial memicu lahirnya kekerasan. Cukup banyak pihak yang memprediksi bahwa Pemilu tahun 2004 ini dapat melahirkan konflik disertai kekerasan, terutama di daerah-daerah pasca konflik atau daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap terjadinya konflik sosial dan politik.

Salah satu tahapan penting dalam Pemilu yang potensial memicu kekerasan adalah kegiatan kampanye. Di masa kampanye, semua kontestan Pemilu berusaha “merayu” pemilih menggunakan beragam cara. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, bentuk kampanye dengan pengerahan massa terbilang rentan bila tidak dikelola dengan baik, karena dapat memicu ketegangan antar pendukung partai. Kekerasan juga mudah dipicu, karena kontestan pemilu mengangkat isu-isu sensitif dalam kampanyenya dengan menyerang kontestan lain, pun melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat mengundang protes banyak pihak.

Dalam rangka membahas strategi mengatasi dampak negatif dari rangkaian kegiatan Pemilu, Yappika berinisiatif mengadakan lokakarya sehari dengan tema : “Membangun Kesepahaman untuk Pemilu Damai dan Berkualitas” di Kota Palu (Sulawesi Tengah), Jember (Jawa Timur) dan Maumere (Flores), yang merupakan wilayah kerja mitra Yappika. Dialog pun bergulir diantara berbagai kelompok masyarakat, KPUD, aparat Kepolisian, dan Panwaslu, guna membangun kesepahaman tentang cara-cara mereduksi potensi kekerasan antar kontestan Pemilu. Dari lokakarya tersebut munculah komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu yang damai dan berkualitas sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing pihak.



Pemilu 2004 di Bawah Darurat Militer Nanggroe Aceh Darussalam

Yappika kembali merancang program pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pemilu 2004 ini. Aceh yang berada dibawah Darurat Militer sengaja dipilih sebagai wilayah kerja dengan pertimbangan bahwa diwilayah yang sarat kekerasan seperti inilah potensi kecurangan akan besar terjadi. Pemilu adalah sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan negara secara demokratis, dimana suara rakyat menentukan terpilihnya para wakil dan pemimpin negara yang akan menjalankan roda pemerintahan. Kedaulatan rakyat untuk memilih wakil dan pimpinan mereka mesti dipertahankan dan dijaga, di wilayah Darurat Militer seperti Aceh sekalipun!

Program yang bertujuan untuk mendorong proses pemilu yang jujur adil dan damai melalui peningkatan kapasitas masyarakat sipil ini dilaksanakan di lima kabupaten yang menjadi fokus program, yaitu Banda Aceh, Sabang, Singkil, Simeulue dan Aceh Tenggara. Dalam melaksanakan programnya, Yappika bekerjasama dengan Forum LSM Aceh dan 5 lembaga lainnya yang mempunyai area kerja di masing-masing kabupaten fokus program, yaitu Yayasan Daur Ulang Aceh (YDUA) di Banda Aceh, Yayasan Peduli Sabang (YPS) di Sabang, Yayasan Simeulue Lestari (YSL) di Simeulue, Satyapila di Aceh Tenggara dan Masyarakat Transparansi (MaTras) di Singkil. Sebanyak sembilan macam aktivitas pendidikan pemilih yang memanfaatkan berbagai lini media dilaksanakan secara serentak di 5 kabupaten, yaitu penayangan iklan layanan masyarakat di TVRI NAD dan radio-radio, penayangan iklan layanan masyarakat di dua harian lokal, dialog interaktif (talkshow) di TVRI NAD maupun radio-radio, pertemuan tatap muka (face to face dialogue) dengan kelompok-kelompok masyarakat, produksi dan distribusi buletin tentang pemilu serta pemutaran film keliling. Pemanfaatan seluruh lini media dalam pendidikan pemilih ini merupakan strategi kampanye yang dirancang guna mendorong terciptanya pemilih yang cerdas, rasional serta terwujudnya proses pemilu yang damai di Aceh.

Sementara itu, untuk kegiatan pemantauan Pemilu Yappika tergabung dalam Koalisi JURDIL, sebuah koalisi nasional untuk pemantauan Pemilu 2004 yang beranggotakan empat lembaga yaitu Forum Rektor, LP3ES, Yappika dan NDI. Pemantauan akan dilakukan di seluruh kabupaten di Aceh (20 kabupaten) dengan menerapkan dua metode pemantauan, yaitu: (a) pemantauan kualitatif, dan (b) pemantauan kuantitatif dengan menggunakan metode Parallel Vote Tabulation (PVT). Sebanyak 402

relawan akan diturunkan di lapangan untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di 402 TPS yang tersebar acak di seluruh kabupaten di Aceh. Sementara itu, 25 relawan di kantor Forum LSM Aceh dan 24 relawan di kantor Yappika bertugas melakukan penerimaan data dari lapangan yang dikirimkan melalui fax. Data yang telah diterima di Yappika dan Forum LSM Aceh akan dianalisis, dan juga dikirimkan ke Forum Rektor di Bandung.



Program-Program yang Didukung melalui PPD Tahap II

■ **Lembaga Studi Desa untuk Petani -SD Inpers (Jember Jawa Timur)**

Total dana hibah Rp. 349.868.000,-

Dana yang telah diberikan Rp 32.942.500,-

Pemberdayaan Forum-forum Desa untuk Advokasi Kebijakan tentang Tata Niaga Pertembakauan di Jember

■ **Malang Corruption Watch (MCW)**

Total dana hibah Rp 346.915.600,-

Dana yang telah diberikan Rp 32.234.600,-

Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Mengawasi Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Malang

■ **IDFoS - Bojonegoro (Jawa Timur)**

Total dana hibah Rp 349.899.500,-

Dana yang telah diberikan Rp 16.924.400,-

Program penguatan kapasitas organisasi rakyat untuk terlibat aktif dalam proses perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan anggaran di kabupaten Bojonegoro

■ **Yayasan Bina Sejahtera (YBS)**

Total dana hibah Rp 348.525.000,-

Dana yang telah diberikan Rp 23.676.400,-

Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata yang Partisipatif dan Demokratis

■ **Yayasan peduli sesama (Sanlima)**

Total dana hibah Rp 349.610.000,-

Dana yang telah diberikan Rp 24.848.800,-

Program Penguatan Posisi Desa Melalui Advokasi Kebijakan dan Penguatan Masyarakat Sipil di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

■ **Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba, South Sulawesi**

Total dana hibah Rp 22.492.000,-

Dana yang telah diberikan Rp 22.492.000,-

Pendataan dan pengorganisasian rakyat korban peristiwa Bulukumba berdarah 21 Juli 2003

■ **Solidaritas Ornop Sulsel (SOS) untuk Bulukumba**

Total dana hibah Rp 43.600.000,-

Dana yang telah diberikan Rp 38.732.600,-

Advokasi litigasi kasus Bulukumba

■ **Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI)**

Total dana hibah Rp 349.775.200,-

Dana yang telah diberikan Rp 68.700.600,-

Konsolidasi Rakyat dan Penguatan OMS/LSM dalam Mendorong dan Mengawal Kebijakan Pesisir dan Laut di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

■ **Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Palu**

Total dana hibah Rp 349.550.500

Dana yang telah diberikan Rp 26.774.500

Demokratisasi Pengelolaan Kawasan Teluk Palu, Kota Palu Sulawesi Tengah

■ **Yayasan Hivlak**

Total dana hibah Rp 349.954.750,-

Dana yang telah diberikan Rp 53.736.500

Program Pemacu Sistem Pemerintahan Yang Demokratis di Kabupaten Maluku Tenggara

Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2003 dan 2002

Aktiva

	2003 Rp.	2002 Rp.
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Bank	2,606,411,490	1,448,625,878
Piutang	614,302,031	563,566,091
Piutang lain-lain	81,155,860	174,235,820
Uang Muka	443,410,503	372,815,292
Total Aktiva Lancar	3,745,279,884	2,559,243,081
AKTIVA TETAP		
Aktiva Tetap (Bersih)	311,777,002	266,645,657
TOTAL AKTIVA	4,057,056,886	2,825,888,738

Kewajiban dan kekayaan bersih

	2003 Rp.	2002 Rp.
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Program	465,833,217	297,875,324
Hutang Lainnya	5,247,976	2,319,997
Hutang Pajak	4,527,933	2,641,534
Total Kewajiban Lancar	475,609,126	302,836,855
KEKAYAAN BERSIH		
Saldo Dana		
- Tidak terikat	2,186,859,799	2,073,045,310
- Terikat	1,394,587,961	450,006,573
Total kekayaan bersih	3,581,447,760	2,523,051,883
TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	4,057,056,886	2,825,888,738

Pernyataan aktivitas dan saldo dana per 31 desember 2003 dan 2002

	Unrestricted Rp.	Restricted Rp.	Total Rp	Total Rp.
REVENUES				
Grants	-	5,816,808,226	5,816,808,226	4,083,674,691
Others	281,254,845		281,254,845	615,064,290
Total Revenues	281,254,845	5,816,808,226	6,098,063,071	4,698,738,981
EXPENDITURES				
Ford Foundations	-	18,130,200	18,130,200	18,570,308
Department for International Development (DFID)	-	1,241,624,008	1,241,624,008	-
Canadian International Development Agency (CIDA) Through Unity Service Corporation				
Canada (USC-Canada) - PPD	-	951,567,618	951,567,618	2,675,015,888
Canadian International Development Agency (CIDA) Through Unity Service Corporation				
Canada (USC-Canada) - PPD Phase II	-	1,729,914,580	1,729,914,580	-
Common Ground	-	6,514,080	6,514,080	-
Canadian International Development Agency (CIDA)	-	83,326,242	83,326,242	-
National Democratic Institute (NDI)	-	127,922,651	127,922,651	251,841,881
TIFA Foundation (TIFA)	-	72,713,930	72,713,930	170,778,160
TCP 3	-	187,214,243	187,214,243	121,932,013
Partnership	-	430,514,098	430,514,098	931,103,004
Administration (Overhead Cost and Fund Raising)	329,898,351	-	329,898,351	543,890,275
Total Expenditures	329,898,351	4,849,441,650	5,179,340,001	4,776,131,529
Excess of Revenues Over Expenditures (Expenditures Over Revenues)	(48,643,506)	967,366,576	918,723,070	(77,392,548)
Reversed Journal Entries- Equipment Acquired from Grant Fund to Fixed Assets	163,452,080	-	163,452,080	160,340,350
Fund Balance, Beginning	2,073,045,310	450,006,573	2,523,051,883	2,424,423,681
Corrections on Fund Balance	(994,085)	(22,785,188)	(23,779,273)	15,680,400
Fund Balance Ending	2,186,859,799	1,394,587,961	3,581,447,760	2,523,051,883